

## **JURNAL ILMIAH:**

# **ARTIKULASI POLITIK MASYARAKAT EKS PENGUNGGSI MALUKU DI KOTA BAUBAU, PROVINSI SULAWESI TENGGARA PADA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2014**

Disusun Oleh: Riswandi Suraabe Walli

## **ABSTRAK**

Kajian tentang Artikulasi politik masyarakat eks pengungsi Maluku di Kota Baubau pada Pemilihan legislative tahun 2014 merupakan satu dari sekian kasus penerapan politik etnis di Indonesia. Dimana, eks pengungsi Maluku menginginkan salah satu wakilnya untuk menduduki kursi legislatif di daerah yang telah mereka tempati selama 15 (lima belas) tahun, hal ini dikarenakan selama kurun waktu tersebut tidak ada satu orangpun perwakilan dari mereka yang menduduki kursi legislatif. Wacana tersebut kemudian dimainkan oleh para elit politik etnis Maluku untuk mengusung ataupun secara kesadaran sendiri untuk maju dan ikut mengambil andil dalam pemilihan legislatif tahun 2014, dengan berlandas pada nasib eks pengungsi Maluku kedepan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, peneliti ingin mendeskripsikan fenomena atau keadaan yang berkaitan dengan artikulasi politik etnis eks pengungsi, dan pengaruh tokoh masyarakat terhadap pilihan politik eks pengungsi dalam pemilihan legislatif Kota Baubau tahun 2014. Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi, sehingga dapat diperoleh data primer maupun data sekunder. Data primer yang diperoleh berupa hasil wawancara terkait dengan politik identitas etnis, pengaruh tokoh masyarakat, bentuk artikulasi kepentingan politik, serta keterlibatan eks pengungsi Maluku dalam Pileg tahun 2014. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi dokumen, baik berupa laporan, peta, hasil rekapitulasi suara. Data-data tersebut kemudian diseleksi dan dianalisis untuk selanjutnya disusun dalam bentuk laporan penelitian.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Artikulasi politik adalah salah satu fungsi yang dijalankan dalam proses pembuatan kebijakan publik, yang didalamnya terdapat kegiatan penggabungan berbagai kepentingan dan tuntutan dalam masyarakat yang akan diimplemetasikan. Politik etnis merupakan politik identitas yang dimunculkan sebagai upaya perebutan kekuasaan, yang cenderung mengukuhkan dan memperkuat identitas etnis, Keterlibatan masyarakat eks pengungsian dalam pemilihan legislatif Kota Baubau tahun 2014, merupakan wujud dari artikulasi kepentingan eks pengungsian Maluku, untuk mengefektifkan tuntutan kelompoknya untuk ikut terlibat secara langsung dalam mempengaruhi kebijakan, dan merumuskan kebijakan, dalam politik etnis, tokoh masyarakat masih mempunyai pengaruh yang sangat signifikan dan sangat menentukan dalam mempengaruhi perolehan suara. Politik etnis tidak selamanya menjadi politik intoleran, rawan konflik, dan sebagainya, politik etnis justru menjadi warna dan ciri khas tersendiri dalam masyarakat multikultural

Saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah diperlukan suatu pemahaman yang secara khusus bahwa dalam artikulasi kepentingan, politik etnis tidak sekedar memperjuangkan kepentingan kelompok etnis tertentu, namun secara umum masyarakat dalam hal ini merupakan seluruh etnis yang ada dalam daerah pemilihan tersebut. Praktek politik etnis yang terjadi di Kota Baubau, khususnya di Kecamatan Wolio, sangat penting untuk dilakukan ekspansi pada daerah multietnis yang rawan konflik, dengan harapan agar konflik politik yang berdasarkan pada etnis dapat dikurangi dan dihilangkan.

*Kata Kunci: Artikulasi Politik, Politik Etnis Eks Pengungsi Dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2014, Serta Pengaruh Tokoh-Tokoh Masyarakat.*

## **A. Pendahuluan**

Perkembangan politik lokal di Indonesia dewasa ini telah mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Salah satu dari perkembangan yang cukup menarik tersebut adalah, munculnya peran politik etnis dari pendatang yang turut serta membangun kemajuan daerahnya. Selain dari pada itu, peran politik etnis kini telah mulai merambah keranah politik praktis, khususnya di dalam agenda Pemilu dimana

suku pendatang mulai berusaha menempatkan wakilnya untuk menduduki posisi-posisi strategis pemerintahan, baik sebagai eksekutif maupun legislatif.

Hal ini dikarenakan Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang berdaulat yang menganut sistem demokrasi, dimana salah satu asas yang termaktub di dalamnya yaitu pemilu. Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, rahasia, jujur, bebas dan adil. Sejarah pemilu juga merupakan sebuah bukti dari bentuk aktualisasi dan agregasi kepentingan masyarakat yang dilembagakan melalui berbagai proses dan instrument demokrasi tersebut. Partisipasi politik dalam Negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan Negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat). Semakin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih (golput) pada pemilu. Sebagai arena kompetisi politik, pelaksanaan pemilu di Indonesia sejak awal pasca kemerdekaan hingga saat ini masih banyak diwarnai oleh tarikan-tarikan kepentingan dari berbagai pihak, baik pada aktor politik maupun pada masyarakat.

Dalam konteks negara yang meniscayakan pemilu secara langsung, maka faktor heterogenitas merupakan suatu komponen yang perlu diperhatikan dan juga

merupakan suatu kajian yang menarik. Terdapat faktor geografis, demografi, sosial masyarakat dan juga kondisi masyarakat secara kategorial. Pada pemilihan umum secara langsung, selain dihadapkan oleh faktor sosial, terdapat pula kondisi atau pengkategorian masyarakat yang sangat besar dalam hal ini kuantitas. Sistem yang ada, mensyaratkan perolehan suara terbanyak dari suatu proses pemilihan sebagai bentuk legitimasi masyarakat. Studi tentang faktor budaya dan etnitas sebagai bentuk pengkategorian yang berpengaruh pada perilaku pemilih, sangat penting untuk di implementasikan.

Seperti yang telah terjadi di kota Baubau, keikutsertaan masyarakat eks pengungsi Maluku dalam ranah politik lokal merupakan suatu kewajaran bagi setiap masyarakat transisi. Tidak bisa dipungkiri bahwasannya akan terjadi dinamika politik yang tentu saja dilakukan oleh masyarakat lokal untuk memecahkan suara dari eks pengungsi Maluku. Adanya kepentingan pribadi, egosentri dari oknum-oknum di dalam etnitas tentu saja membuat praktik politik etnis masyarakat eks pengungsi Maluku mengalami kegagalan.

Dengan demikian fenomena diatas tentunya memberikan satu pelajaran yang sangat berharga, bahwasannya apabila dikelola dengan baik maka politik etnis masih memegang peranan penting di dalam kancah perpolitikan di Indonesia, akan tetapi jika kepentingan pribadi di utamakan maka keberhasilan dalam memainkan politik etnis tidak akan bisa terwujud. Berangkat dari berbagai fenomena politik etnis diatas seperti yang terjadi di Kota Medan, Kota Palopo, serta fenomena politik etnis di di

kota Baubau, maka tentunya akan sangat menarik jika dilakukan sebuah penelitian terkait dengan:

***“Artikulasi Politik Masyarakat Eks Pengungsi Maluku Di Kota Baubau, Povinsi Sulawesi Tenggara, Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014”.***

Penelitian ini mengambil studi kasus Dapil 2 Kota Baubau yang meliputi (Kecamatan Wolio). Meski gagal memenangkan Jufri Rasyid sebagai calon dari eks pengungsi Maluku pada pemilu tahun 2014, setidaknya masyarakat eks pengungsi Maluku telah memainkan politik etnis di kota Baubau.

## **B. Bahan dan Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu metode dalam penelitian suatu obyek, suatu peristiwa pada masa sekarang. Sugiono menyebutkan bahwa metode penelitian kualitatif sering disebut “Metodepenelitian Naturalistik” karena penelitian yang dilakukan tersebut pada kondisi yang alamiah (Natural Setting). Menurut Moh Nazir penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, obyek, kondisi serta suatu system pemikiran ataupun kilas peristiwa pada masa sekarang. Sementara koentjoro mendefenisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalamk konteks

sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.<sup>1</sup>

Adapun tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif ini adalah untuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara sistematis, faktual serta akurat mengenai fakta-fakta, sifat dan hubungan antara fenomena- fenomena yang diteliti.

### **1. Jenis Data**

Adapun data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah data Primer dan data Skunder.

#### **a. Data Primer**

Data primer merupakan tuntunan utama dalam aturan dasar metode sejarah. Pada penelitian ini data primer merupakan data yang diperoleh dari para narasumber termasuk data serta informasi mengenai Bagaimana politik etnis eks pengungsi Maluku di Kota Baubau pada pileg tahun 2014.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, makalah, media massa baik media cetak maupun media elektronik serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis.

---

<sup>1</sup> Haris Herdiansyah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Salemba Humanika. Jakarta. 2010. hlm 9.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data<sup>2</sup>. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.

### a. Wawancara

Metode interview atau wawancara adalah proses tanya jawab lisan dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, yang satu dapat melihat mitra yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri.<sup>3</sup> Antara penulis dengan interviewer dengan subyek penelitian yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini interview atau wawancara ditujukan pada eks pengungsi Maluku yang berdomisili di Dapil 2 Kota Baubau.

Adapun narasumber yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah antara Lain :

- a.) Jufri Rasyid selaku Caleg dari etnis masyarakat eks pengungsi Maluku.
- b.) Tokoh masyarakat eks pengungsi Maluku.
- c.) Pemilih tetap masyarakat eks pengungsi Maluku di dapil 2.
- d.) Tim pemenangan.

---

<sup>2</sup>Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.hal.308

<sup>3</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 1994, hlm. 04

- e.) Masyarakat etnis lokal kota Baubau.
- f.) Komisi Pemilihan Umum Daerah setempat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mempelajari dan memanfaatkan buku, dokumen, literatur, catatan-catatan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah atau pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

Adapun beberapa dokumentasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah Laporan Hasil Pemilihan Legislatif di kota Baubau tahun 2014.

c. Observasi atau pengamatan

Metode ini digunakan dengan maksud untuk mengamati dan mencatat gejala-gejala yang tampak pada obyek penelitian pada saat keadaan atau situasi yang alami atau yang sebenarnya sedang berlangsung, meliputi perilaku politik eks pengungsian Maluku dalam pemilihan legislatif Kota Baubau, peran tokoh masyarakat, bentuk artikulasi kepentingan, peran politik identitas etnis, dan kondisi lain yang dapat mendukung hasil penelitian.



### 3. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian tentang politik etnis masyarakat eks pengungsi Maluku pada Pemilihan Legislatif Dapil 2 Kota Baubau tahun 2014, penulis menggunakan teknik analisa Kualitatif. Menurut Koentjaraningrat analisis data dibedakan menjadi dua bagian yaitu analisa kualitatif dan kuantitatif. Apabila data yang dikumpulkan hanya sedikit bersifat monografis atau terwujud kasus-kasus (sehingga dapat disusun dalam struktur klasifikasi), maka analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif. Tetapi apabila data yang dikumpulkan tersebut berjumlah besar dan mudah diklasifikasikan kedalam kategori-kategori maka yang digunakan adalah analisa kuantitatif.<sup>4</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa kualitatif interpretatif yaitu dengan cara mengkualifikasikan data yang diperoleh dari Jufri Rasyid (Caleg Etnis) atau para narasumber dan diolah dengan menggunakan kualitatif serta penggunaan skor dan skala seperti biasa dilakukan dalam analisis kuantitatif. Baik data primer maupun data sekunder dipilah-pilah sesuai dengan karakteristiknya dengan melihat kecenderungan yang berpautan satu sama lain dengan indikator penelitian yang ditetapkan.

---

<sup>4</sup>Koentjaraningrat. *Metode Penelitian Masyarakat*. PT Gramedia. Jakarta. 2007. Hlm 4

### **c. Hasil Penelitian**

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Artikulasi politik adalah salah satu fungsi yang dijalankan dalam proses pembuatan kebijakan publik, yang didalamnya terdapat kegiatan penggabungan berbagai kepentingan dan tuntutan dalam masyarakat yang akan diimplemetasikan. Politik etnis merupakan politik identitas yang dimunculkan sebagai upaya perebutan kekuasaan, yang cenderung mengukuhkan dan memperkuat identitas etnis, Keterlibatan masyarakat eks pengungsian dalam pemilihan legislatif Kota Baubau tahun 2014, merupakan wujud dari artikulasi kepentingan eks pengungsian Maluku, untuk mengefektifkan tuntutan kelompoknya untuk ikut terlibat secara langsung dalam mempengaruhi kebijakan, dan merumuskan kebijakan, dalam politik etnis, tokoh masyarakat masih mempunyai pengaruh yang sangat signifikan dan sangat menentukan dalam mempengaruhi perolehan suara. Politik etnis tidak selamanya menjadi politik intoleran, rawan konflik, dan sebagainya, politik etnis justru menjadi warna dan ciri khas tersendiri dalam masyarakat multikultural.

### **d. Pembahasan**

#### **1. Artikulasi politik masyarakat eks pengungsi Maluku pada PEMILU legislatif**

Artikulasi Kepentingan sebagai suatu proses penginputan berbagai kebutuhan, tuntutan dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif, agar kepentingan, tuntutan dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan

terlindungi dalam kebijaksanaan pemerintah. Pemerintah dalam mengeluarkan suatu keputusan dapat bersifat menolong masyarakat dan bisa pula dinilai sebagai kebijaksanaan yang justru menyulitkan masyarakat. Oleh karena itu warga negara atau setidak-tidaknya wakil dari suatu kelompok harus berjuang untuk mengangkat kepentingan dan tuntutan kelompoknya, agar dapat dimasukkan ke dalam agenda kebijaksanaan negara. Wakil kelompok yang mungkin gagal dalam melindungi kepentingan kelompoknya akan dianggap menggabungkan kepentingan kelompok, dengan demikian keputusan atau kebijaksanaan tersebut dianggap merugikan kepentingan kelompoknya.

Bentuk artikulasi yang paling umum di semua sistem politik adalah pengajuan permohonan secara individual kepada para anggota dewan (legislatif), atau kepada Kepala Daerah, Kepala Desa, dan seterusnya. Kelompok kepentingan yang ada untuk lebih mengefektifkan tuntutan dan kepentingan kelompoknya, mengelompokkan kepentingan, kebutuhan dan tuntutan kemudian menyeleksi sampai di mana hal tersebut bersentuhan dengan kelompok yang diwakilinya. Artikulasi kepentingan sudah ada sepanjang sejarah dan kelompok kepentingan akan semakin tumbuh seiring semakin bertambahnya kepentingan manusia, jadi kelompok kepentingan hanya ingin mempengaruhi pembuatan keputusan dari luar, sedangkan partai politik dari dalam.

Dengan semangat persaudaraan dan etnis yang kuat, masyarakat eks pengungsian bersepakat untuk mendorong salah satu wakil mereka dalam Pemilihan Legislatif Kota Baubau 2014, dengan harapan untuk dapat menjamin masa depan eks

pengungsian dengan berbagai kebijakan yang nantinya akan melibatkan diri secara langsung. Bila dilihat dari total jumlah jiwa masyarakat eks pengungsian, bisa dipastikan mereka dapat mengirim satu hingga dua perwakilan mereka di DPRD Kota Baubau, yang dalam setiap pemilu legislatif, satu kandidat cukup mengumpulkan 2000 (Seribu) sampai 3000 (Dua ribu) suara sah untuk daerah pemilihan dua (Dapil 2) yang meliputi Kecamatan Wolio, itu merupakan angka yang terhitung aman dalam mendapatkan satu kursi (Wawancara Tim sukses dari PAN).

Jufri Rasyid, merupakan salah satu tokoh yang di usung dalam pemilihan legislatif 2014 Kota Baubau, sebagai salah satu eks pengungsian yang bergabung bersama dengan Partai Amanat Nasional (PAN), dengan posisi sebagai Sekretaris Jenderal DPC Partai Amanat Nasional Kota Baubau. Jufri Rasyid, S.Ip, memperoleh nomor urut 1 untuk Dapil wilayah 2 yang meliputi Kecamatan Wolio, dengan total daftar pemilih tetap (DPT) 49.584 dan harus bersaing dengan 6 (enam), kandidat yang lain dengan partai yang sama. berikut merupakan tabel kandidat caleg dari Partai Amanat Nasional Dapil 2.<sup>5</sup>

## **2. Politik Etnis**

Dalam percaturan politik di negeri ini, masalah etnis kerap dijadikan salah satu cara untuk menjelekkan atau menjatuhkan, lawan politiknya. Identitas politik etnis dikonstruksi oleh elit dalam melakukan tindakan-tindakan yang terkait pada

---

<sup>5</sup><http://kpu.Baubaukota.go.id/statik/94/hasil.pemilu.2014.html>, diakses pada hari Selasa, 28 Juli 2015, Pukul 09.00.

kepentingan wilayah etnis. Sebagian elit memandang etnisitas sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan, persaingan untuk memperoleh sumberdaya, menciptakan solidaritas dan kebersamaan, mengukuhkan dan memperkuat identitas, serta membedakan dengan kelompok etnik yang lain.

Era politik kontemporer saat ini menunjukkan sebuah realitas kegamangan yang dialami bangsa Indonesia terkait menguatnya politik identitas. Agnes Heller (dalam Abdillah, 2002: 22) mengasumsikan politik identitas sebagai politik yang memfokuskan pembedaan sebagai kategori utamanya yang menjanjikan kebebasan, toleransi, dan kebebasan bermain (*free-play*) walaupun memunculkan pola-pola intoleransi, kekerasan dan pertentangan etnis. Politik identitas dapat mencakup rasisme, bio-feminisme, environmentalism (politik isu lingkungan), dan perselisihan etnis. Oleh karena itu, bila dilacak dari sejarah Indonesia politik identitas yang muncul cenderung bermuatan etnisitas, agama dan ideologi politik. Terkait dengan kondisi bangsa Indonesia yang multikulturalisme, maka politik identitas etnis dapat menjadi bahan kajian yang menarik untuk ditelaah.

### **3. Masyarakat eks pengungsi Maluku**

Masyarakat eks pengungsi Maluku yang notabene merupakan masyarakat dengan etnis Maluku (Ambon), pada saat terjadinya konflik SARA di Maluku pada tahun 1999, masyarakat memilih untuk berpindah tempat dari Maluku ke Kota Baubau, sebagai upaya mencari daerah yang saat itu lebih aman dan nyaman. Baubau

sebagai salah satu kawasan yang masuk dalam wilayah Sulawesi Tenggara dinilai sebagai salah satu daerah yang layak untuk dijadikan tempat pengungsian.

Konflik yang berlangsung cukup lama, menjadi salah satu alasan yang paling kuat dari masyarakat eks pengungsian untuk bertahan hidup di Kota Baubau, membangun tempat tinggal (rumah), membeli tanah untuk bercocok tanam, melamar kerja di berbagai instansi pemerintahan, dan sebagainya.

Keberadaan masyarakat eks pengungsian Maluku di Kota Baubau tidak hanya sebagai masyarakat pendatang yang tidak mempunyai kemampuan apa-apa, justru sebaliknya bahwa masyarakat eks pengungsian ikut terlibat langsung dalam memajukan Kota Baubau, hal ini dibuktikan dengan ada beberapa instansi pemerintahan Kota Baubau yang itu dipercaya masyarakat eks pengungsian Maluku menempati posisi-posisi strategis, antara lain menjadi Kepala Dinas Pendidikan, Perhubungan, Kepala Sekolah, Guru, dan juga PNS. Keterlibatan eks pengungsian, tersebut mendapat apresiasi dari pemerintah setempat, hingga konflik di Maluku telah selesai masyarakat lebih memilih menetap di Kota Baubau, dari pada harus kembali lagi ke Maluku, ada yang beralasan karena masih trauma, ada juga yang karena kebutuhan ekonomi keluarga yang telah membaik.

#### **4. Strategi masyarakat eks pengungsi Maluku pada Pemilu legislatif tahun 2014**

Strategi politik sebagai upaya dalam memenangkan perolehan suara dalam menempati satu tempat dalam pemilu legislatif, dorongan masyarakat untuk mendorong perwakilannya, wakil rakyat yang di anggap mampu membawa

perubahan masyarakat pada umumnya, dan khususnya masyarakat eks pengungsian yang ada di Kota Baubau. adapun strategi yang di gunakan sebagai berikut:

1. Membangun Basis Masa; Basis massa merupakan cara yang digunakan untuk menjadikan basis pertahanan kandidat, basis masa terdiri dari berbagai lintas usia, suku, agama, dan golongan, yang diposkan salah satu desa yang menjadi kantong perolehan suara secara mutlak.
2. Kegiatan Kemasyarakatan; Berbagai kegiatan kemsyarakatan dibuat, seperti halnya bantuan sosial, posko pengaduan masyarakat, sepak bola, pengajian bersama untuk kalangan muslim.
3. Konssolidasi antar Etnis; Politik etnis menjadi sangat mempengaruhi hasil prolehan suara, dengan demikian membangun kekuatan antara etnis menjadi konsentrasi khusus.
4. Kelompok Pemuda; Pemilih pemula di dorong untuk ikut andil dalam menentukan masa depan Kota Baubau kedepan, sosialisasi cara mencoblos dengan baik dan benar, selain ada sosialisasi dari KPUD.

## **5. Pengaruh Tokoh Masyarakat**

Dalam penelitian ini, penulis menemukan tokoh memiliki kekuatan tersendiri, dalam beberapa tahun terakhir pilihan politik masyarakat merupakan pilihan yang berdasarkan pada pilihan tokoh, pengaruh figur dari kandidat sangat jauh berbedah dengan pengaruh tokoh yang dipercaya. Terstigma dalam masyarakat bahwa pilihan tokoh yang mereka percaya merupakan pilihan yang tepat dan terlihat seperti halnya

doktrin, jadi apa yang menjadi pilihan tokoh itu merupakan pilihan masyarakat, dan masyarakat tidak punya pilihan lain selain mengikuti pilihan tokoh tersebut. Politik demikian sangatlah mudah dibaca pemenang pemilu di daerah tersebut, didasarkan pada pilihan tokoh masyarakat terhadap kandidat siapa yang dipilih oleh tokoh tersebut, sebelum hasil perhitungan suara kita sudah bisa pastikan pemenangnya.

Pengaruh tokoh tersebut seperti halnya di beberapa daerah di pedalaman Papua, yang masih tunduk patuh pada pilihan kepala suku. ataupun di beberapa daerah di Maluku dengan istilah Papa Raja. Demikian yang tergambar dalam pengaruh tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Wolio Kota Baubau. Pengaruh kandidat menjadi subordinat dari pengaruh tokoh tersebut, kandidat yang sangat berpengaruh bila kandidat tersebut memiliki hubungan darah (*Keluarga*) dengan mereka. Sebuah cerminan politik yang bukan terlahir dari kesadaran pemilih, ataupun lahir dari visi dan misi dari caleg yang nantinya dapat diminta pertanggung jawaban, namun pilihan politik yang telah menjadi dogma yang tertanam kuat semenjak mereka masih usia anak-anak.

Adapun tokoh masyarakat yang berperan penting dalam konsep artikulasi politik etnis masyarakat eks penguasi Maluku adalah sebagai berikut:

1. Tokoh adat
2. Tokoh agama
3. Tokoh Pemerintahan



4. Tokoh intelektual
5. Tokoh calon kandidat.

#### **e. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisa yang dijumpai peneliti saat berada dilapangan terhadap Politik Etnis Masyarakat Eks. Pengusian Maluku pada Pileg Kota Kota Baubau Sulawesi Tenggara 2014, yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, maka secara rinci kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Artikulasi politik sebagai kebutuhan, tuntutan dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif, agar kepentingan, tuntutan dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam kebijaksanaan pemerintah.
2. Politik etnis merupakan politik identitas yang dimunculkan sebagai upaya perebutan kekuasaan, yang cenderung mengukuhkan dan memperkuat identitas, serta membedakan dengan kelompok entis yang lain untuk memperoleh sumber daya, guna menciptakan solidaritas dan kebersamaan.
3. Keterlibatan masyarakat eks pengungsian dalam pileg Kota Baubau tahun 2014, merupakan wujud dari artikulasi kepentingan eks pengungsian Maluku, untuk mengaktifkan tuntutan kelompoknya untuk ikut terlibat secara langsung dalam mempengaruhi kebijakan, dan merumuskan kebijakan dengan

harapan dapat menjamin masa depan eks pengungsian dalam berbagai kebijakan yang dihasilkan.

4. Politik etnis masyarakat eks pengungsian Maluku, merupakan bentuk dari praktek politik yang toleran dan lebih mengedepankan rasa persaudaraan untuk meminimalisir konflik antar etnis, hal ini ditunjukkan sebagai niatan yang baik dari masyarakat eks pengungsian dalam wujud kongkrit untuk ikut memajukan Kota Baubau.
5. Dalam politik etnis, tokoh masyarakat masih mempunyai pengaruh yang sangat signifikan dan sangat menentukan dalam mempengaruhi perolehan suara, dikarenakan tokoh masyarakat merupakan simbol orang yang dihargai dan sangat dipercaya dalam menentukan pilihannya, walaupun hal ini terkesan irasional, namun dalam praktek politik etnis, hal ini masih menjadi acuan dalam bentuk perebutan kekuasaan.
6. Politik etnis tidak selamanya menjadi politik intoleran, rawan konflik, dan sebagainya, politik etnis justru menjadi warna dan ciri khas tersendiri dalam masyarakat multikultural, sebagai bukti kuat bahwa keterlibatan etnis masyarakat eks pengungsian Maluku pada pileg Kota Baubau, disambut baik oleh masyarakat lokal, sebagai bentuk kedewasaan berpolitik masyarakat serta lebih memperkuat rasa persaudaraan antara etnis yang hidupnya berdampingan.

## **f. Saran**

Adapun saran yang dapat diajukan oleh penulis sebagai hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan suatu pemahaman yang secara khusus bahwa dalam artikulasi kepentingan, politik etnis tidak sekedar memperjuangkan kepentingan kelompok etnis tertentu, namun secara umum masyarakat dalam hal ini merupakan seluruh etnis yang ada dalam daerah pemilihan tersebut.
2. Politik etnis merupakan keragaman dan keunikan yang menjadikan ciri khas dari negeri multikultural, akan tetapi bukan menjadikan pemilih menjadi irasional dalam menentukan pilihan, artinya bahwa saat perwakilan etnis tidak mempunyai kemampuan, maka egosime etnisistas harus ditinggalkan guna mewujudkan kepentingan umum.
3. Praktek politik etnis yang terjadi di Kota Baubau, khususnya di Kecamatan Wolio yang dapat meminimalisir konflik, sangat penting untuk dilakukan ekspansi pada daerah multietnis yang rawan konflik atas pemahaman yang sama, dengan harapan agar konflik politik yang berdasarkan pada etnis dapat dikurangi dan dihilangkan.
4. Kekalahan Jufri Rasyid, dalam pemilihan legislatif, harus diterima sebagai proses pembelajaran, agar kedepan masyarakat eks pengungsi Maluku lebih mensolidkan kekuatan sehingga dapat terorganisir

dengan baik untuk kedepan bis meloloskan wakilnya di parlemen kota Baubau.

5. Dalam politik praktis, seluruh elemen harus dapat dirangkul sebagai kekuatan politik, tidak terbatas hanya pada masyarakat eks pengungsi, dan harus menghindari kepentingan kelompok pragmatis, sehingga apa yang menjadi cita-cita bersama dapat tercapai.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo Mariam. 2008.*Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi, Gramedia: Jakarta.
- Erianti Fitri. *Dinamika Posisi Identitas Etnis Tionghoa Dalam Tinjauan Teori Identitas Sosial*. *Jurnal Demokrasi Vol. V No. 1 Th.2006*.
- Haris Herdiansyah. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Salemba Humanika. Jakarta.
- Koentjaraningrat. 2007. *Metode Penelitian Masyarakat*. PT Gramedia. Jakarta.
- Madiki Abdul, dkk. 2004. *IDPs Profile and Settlement in Southeast Sulawesi (Bau-Bau, Buton, dan Muna)*.
- Marzuki Muhammad. *Perspektif Etnik Situasional Dalam Komunikasi Politik Anggota DPRD Pada Wilayah Multi Etnik*. *Jurnal Academica Fisip Untad Vol.2 No. Oktober 2010*.

Muhammad. *Perspektif Etnik Situasional Dalam Komunikasi Politik Anggota DPRD Pada Wilayah Multi Etnik*. *Jurnal Academica Fisip Untad Vol.2 No. Oktober 2010*.

Zamroni. 1992. *Pengantar pengembangan teori social*. Tiara Wacana, Yogyakarta.

Munawarrah 2011. *Skripsi Politik Etnis Masyarakat Pendetang Di Kota Palopo*. Program Studi Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanudin Makassar.

Sjaf Sofyan 2014. *Politik Etnik Dinamika Politik Lokal Di Kendari*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.

Sofyan Effendi dan Masri Singarimbun.1986. *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sutrisno Hadi. 1994. *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Tionghoa-Indonesia>. Diakses pada tanggal 10 Mei 2014

<http://Politik/Etnis/> www.google.com. Diakses tanggal 11 Mei 2014

<http://id.wikipedia.org/wiki/primodialisme>

<http://www.fica.org/hr/ambon/id> . *Kronologis Kerusuhan Ambon Sept1999*: diakses pada tanggal 19 Mei 2014.pukul 20.17 WIB